



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENGAWAL PELAKSANAAN TUGAS SATUAN TUGAS PERJUDIAN ONLINE

Marfuatul Latifa

Analisis Legislatif Ahli Madya
marfulatifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia mengalami darurat judi daring, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa nilai transaksi judi daring pada tahun 2023, menembus angka Rp327 triliun atau hampir 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Jumlah tersebut terus meningkat, pada kuartal I Januari-Maret 2024 nilai transaksi judi daring sudah berada pada angka Rp100 triliun. Pemasalahan perjudian daring juga menimbulkan korban jiwa, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2024, dilaporkan sudah ada empat orang yang mengakhiri hidup mereka akibat judi daring.

Guna mengatasi permasalahan ini, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Pemberantasan Perjudian Daring) pada 14 Juni 2024 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 21 Tahun 2024. Satgas tersebut bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien; meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring; dan menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Tugas tersebut memuat tujuan pemberantasan perjudian daring yang komprehensif, sebab Satgas bertugas melakukan penegakan hukum dan pencegahan terjadinya perjudian daring di Indonesia.

Selain itu, pembentukan satgas juga bertujuan untuk memperbaiki koordinasi antara kementerian/lembaga negara (K/L) yang selama ini memiliki peran dalam upaya pemberantasan perjudian daring. K/L yang dimaksud antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kepolisian RI; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; serta berbagai K/L lainnya. Pelibatan berbagai K/L ini merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan perjudian daring, yang selama ini dilakukan secara parsial oleh masing-masing K/L.

Satgas telah mulai menjalankan tugasnya melalui upaya edukasi pencegahan judi daring melalui *short message service* (SMS) *blast* dengan menggandeng operator telekomunikasi selular. Selain itu, Satgas juga telah melakukan penutupan *network access point* (NAP) dari Filipina dan Kamboja, sebab kedua negara tersebut disinyalir memiliki banyak produsen perjudian daring yang menjadikan Indonesia sebagai pasarnya.

Pembentukan Satgas tersebut mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, Adrianus Meliala, pakar Kriminologi, menyatakan bahwa, Satgas harus mengedepankan penanganan permasalahan perjudian daring pada hulu permasalahan, yaitu penegakan hukum terhadap bandar, pemilik server dan/atau pemilik akun bank perjudian daring. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Alfons Tanujaya, ahli keamanan siber dan forensik digital, yang menyatakan bahwa pemblokiran server perjudian daring tidak akan mengatasi permasalahan judi daring sebab bandar dan pemilik server akan menciptakan server judi daring baru setelah

pemblokiran, penegakan hukum terhadap bandar dan pemilik server dapat menutup perkembangan perjudian daring. Meliala melanjutkan upaya penegakan hukum terhadap masalah hilir, yaitu penindakan terhadap pelaku perjudian daring di lapangan dapat dilakukan setelah penyelesaian permasalahan di hulu.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan bahwa Satgas Pemberantasan Perjudian Daring harus fokus pada inti permasalahan perjudian daring, bukan hanya melakukan penindakan pada masalah-masalah permukaan. Oleh karena itu, Satgas diharapkan dapat melakukan penegakan hukum bersamaan dengan peningkatan upaya pencegahan baik melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun dengan melakukan patroli di ruang siber.

Pembentukan Satgas tersebut mendapatkan respons positif dari Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa Komisi III akan mendukung penuh Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, sebab pembentukan Satgas ini merupakan tanda keseriusan negara dalam memberantas judi daring di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR yang lain, Habiburokhman, yang mengatakan bahwa Komisi III DPR siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Perjudian Daring sebagai wujud dari dukungan Komisi III DPR terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo.

Atensi DPR

Pengawasan terhadap kinerja Satgas Pemberantasan Perjudian Daring sangat penting untuk memastikan bahwa Satgas menjalankan tugas secara efektif dan mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya perjudian daring, sebab masa tugas Satgas Pemberantasan Perjudian Daring akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sebagai mitra kerja pemerintah khususnya dalam penegakan hukum, kegiatan pengawasan oleh Komisi III DPR RI dapat dilakukan dengan memberikan masukan pada Satgas dalam menentukan prioritas pemberantasan perjudian daring, baik dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap bandar, pemilik server dan/atau pemilik akun bank perjudian daring dapat diutamakan, sebab penegakan hukum terhadap pihak-pihak tersebut dapat mengatasi salah satu akar permasalahan perjudian daring. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat memberi masukan kepada Satgas dalam menentukan langkah-langkah konkrit yang dapat ditempuh oleh Satgas Pemberantasan Perjudian Daring agar tugasnya dapat selesai sebelum masa tugas berakhir.

Sumber

cnnindonesia.com, 28 Juni 2024;
detik.com, 14 Juni 2024;
Kompas, 25 Juni 2024;

tempo.co, 19 Juni 2024;
tribunnews.com, 19 Juni 2024;
video.tempo.co, 28 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.